

BAB III

**PROSES PERPINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN
BANYUMAS KE KOTA PURWOKERTO**

A. Latar Belakang Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

1. Awal Munculnya Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan

Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto pada tahun 1937 merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi masyarakat Banyumas. Kota Banyumas merupakan sebuah pusat pemerintahan yang sakral dan mempunyai sejarah yang panjang bagi masyarakat Banyumas. Sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa wilayah Kota Banyumas telah menjadi sebuah pusat pemerintahan. Sehingga peristiwa perpindahan pusat pemerintahan tersebut pun menjadi peristiwa yang sakral pula.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto merupakan sebuah proses yang panjang. Dalam catatan arsip yang berupa surat rahasia yang ditulis oleh Residen Banyumas pada 4 Februari 1933 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dapat diketahui bahwa usulan perpindahan pusat pemerintahan sebenarnya telah diusulkan sejak tahun

1896. Dalam surat yang ditulis oleh Residen Banyumas saat itu yaitu W. Ch.

Adrians dituliskan sebagai berikut:

Sehubungan dengan penelitian pemeriksaan saya tentang harapan dan kemungkinan pengalihan tempat kepala bagian (ibukota) dari Banyumas ke Purwokerto, saya memberitahukan kepada yang mulia hal itu sebagai berikut.

Berdasarkan petunjuk keterangan data-data yang ada dalam arsip saya, perkara ini dilihat untuk pertama kali di tahun 1896, sebagai bagian dari usulan reorganisasi oleh Mullemeister. Angan-angan peraturan perpindahan waktu itu dikaitkan dengan tidak adanya usulan pengisian lowongan Bupati Purbalingga waktu itu, sebelum pengisian tidak ada kandidat yang tepat yang dapat ditunjuk. Pertimbangan ini menjadi alasan untuk mengisi lowongan itu oleh salah satu dari dua Bupati, yaitu Bupati Purwokerto atau Banyumas, yang kiranya harus diiringi dengan penghapusan dari kabupaten yang diangkat.¹

Dari surat rahasia Residen Banyumas tersebut terungkap bahwa usulan perpindahan pusat pemerintahan tersebut sebenarnya pernah mencuat pada tahun 1896. Namun demikian, usulan dari Mullemeister saat itu belum cukup menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah kolonial untuk mengeluarkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Kekosongan bupati Purbalingga akhirnya dapat tersatasi setelah pemerintah kolonial mengangkat seorang bupati baru untuk menggantikan bupati yang lama.

Pada awal tahun 1930-an pada masa pemerintahan Residen W. Ch. Adrians wacana tentang penggabungan dan perpindahan Kabupaten

¹ W. Ch. Adrians, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Banyumas ke Kota Purwokerto telah menjadi isu yang cukup hangat dikalangan pemerintahan. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi pemerintah kolonial Belanda yang saat itu sedang berusaha melakukan penghematan untuk menghadapi krisis ekonomi global. Selain itu, kondisi yang semakin ramai di Kota Purwokerto juga menjadi salah satu alasan yang sangat dipertimbangkan.

2. Zaman “*Mleset*”

Pada tahun 1930-an dunia mengalami krisis ekonomi global. Krisis ekonomi ini timbul sebagai akibat dari Perang Dunia I. Masyarakat Eropa menyebut situasi krisis ekonomi ini dengan istilah *malaise*. Sedangkan masyarakat Jawa khususnya masyarakat Banyumas menyebut situasi pada masa tersebut dengan istilah zaman *mleset* karena setiap usaha selalu *mleset* (gagal) tidak ada hasilnya.² Kondisi tersebut mengakibatkan kemiskinan masyarakat semakin meluas.

Kelesuan pasar dunia, terutama terhadap kepentingan bahan mentah, menyebabkan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda berada dalam posisi yang sulit. Hal ini terjadi karena kawasan Hindia Belanda pada saat itu sangat mengandalkan ekspor bahan-bahan mentah hasil pertanian ataupun perkebunan seperti , tebu, kopi, indigo, kelapa, serta tembakau.³ Bagi

² Soegeng Wijono dan Sunardi, *Banjoemas Riwajatmoe Doeloe, Purwokerto*: Daya Mandiri Production, 2006, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

pemerintah Hindia Belanda kondisi krisis ekonomi tersebut mengakibatkan kebangkrutan, baik kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Akibat dari bangkrutnya perekonomian pemerintah Hindia Belanda, di Karesidenan Banyumas pada tahun 1930, pabrik-pabrik gula yang sebenarnya mempunyai arti ekonomi yang sangat besar, baik bagi pemerintah Hindia Belanda maupun bagi masyarakat pribumi harus ditutup. Pabrik-pabrik gula tersebut diantaranya adalah pabrik gula Kalibagor, pabrik gula Sumpiuh, Pabrik gula Purwokerto, Pabrik gula Klampok, dan pabrik gula Bojong.⁴ Dengan ditutupnya pabrik-pabrik gula tersebut, maka masyarakat di Karesidenan Banyumas saat itu semakin mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan semakin meluas.

Pada tahun 1930-1935 kemiskinan melanda masyarakat hampir diseluruh daerah di Banyumas. Sumber mata pencaharian di pabrik-pabrik, perkebunan, serta perburuhan hilang. Keadaan yang sedemikian sulit membuat masyarakat di wilayah Karesidenan Banyumas tidak mempunyai mata pencaharian lagi, dan akhirnya mendorong mereka untuk menjadi pengemis. Di daerah perkotaan seperti Purwokerto, dan Cilacap pengemis laki-laki, perempuan bahkan anak-anak berkeliaran terutama pada hari

⁴ Prima Nurahmi M, (2010), “Runtuhnya Suatu Kejayaan: Kota Banyumas 1900-1937”, dalam Sri Margana dan M. Nursam (Ed), *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010, hlm. 26.

Minggu.⁵ Para pengemis tersebut hanya berpakaian seadanya, badan mereka kurus kering, kakinya bengkak-bengkak, dan perutnya buncit. Hal tersebut menunjukkan mereka terkena penyakit busung lapar.

Masyarakat di Karesidenan Banyumas jatuh dalam kemiskinan secara bersama-sama. Bahkan di pedesaan kondisi masyarakat sangat memprihatinkan, sebagian masyarakat hanya bisa makan daun-daunan, *ares* (bonggol) pohon pisang, *gaber* (ampas ketela pohon), atau *gelang* (ampas pohon aren) yang biasanya hanya diberikan untuk hewan-hewan ternak masyarakat. Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut membuat masyarakat Banyumas menderita kekurangan gizi. Akibatnya masyarakat sangat mudah terserang penyakit-penyakit. Selain busung lapar penyakit lain yang umumnya banyak menjangkit masyarakat adalah influenza dan malaria serta penyakit-penyakit kulit seperti gudig, koreng, patek, dan borok. Oleh karena itu ribuan masyarakat di Karesidenan Banyumas pada saat itu terserang penyakit busung lapar.

Masyarakat yang sudah tidak mempunyai penghasilan lagi pada umumnya menggadaikan barang-barang milik mereka. Gudang-gudang pegadaian penuh sesak dengan barang-barang yang digadaikan, seperti pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, dan alat-alat pertanian. Barang-barang tersebut menumpuk tidak dapat ditebus lagi oleh

⁵ Soegeng Wijono dan Sunardi, *loc. cit.*

masyarakat yang menggadaikan karena mereka tak memiliki uang. Akhirnya barang-barang seperti perhiasan, perkakas rumah tangga, pakaian, dan alat-alat pertanian dilelang dengan harga yang sangat murah.⁶

Kondisi krisis ekonomi global (*malaise*) atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan istilah jaman “mleset” ini juga digambarkan oleh Raden Poerwasoepradja yang merupakan mantan patih Bayumas yang pensiun pada hari Minggu kliwon tanggal 21 Februari 1932. Berikut ini kutipan dari tulisan Raden Poerwasoepradja dalam babad Banjoemas:

Ing wekdal samangke, menggah ingkang katingal ing poendi-poendi sampoen sarwa-sarwi sae, ing bawah Tjilatjap, radinanipoen sisih ler ingkang sawaoenipun rekaos sanget menggah ing tijang kekesahan, sapoenika saking tanah Pasoendan anglankoengi Madjenang teroes dateng Wangon bawah Djatilawang (Poerwakerta) sampoen kenging kangge lampah motor, nanging djamanipoen saweg soesah, rekaos, pabrik-pabrik bade sami toetoep sadaja, tatedan roepi-roepi kawedalaning dosoen mirah sanget. Tijang katah karepotan ageng bab pambayaran paos, ngantos langkah saking wektoenipun tansah dereng sami saged loenas.⁷

(pada saat itu, dimana-mana sudah terlihat baik, di Tjilatjap jalan sisi utara yang dulunya sangat menyulitkan orang-orang yang bepergian, sekarang dari tanah Pasoendan melewati Madjenang terus sampai Wangon dan Djatilawang (Poerwakerta) sudah bisa dilalui motor, tetapi saat ini jamannya sedang susah, pabrik-pabrik akan tutup semua, bahan makanan dari desa harganya sangat murah. Orang banyak yang kesulitan membayar pajak, sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa lunas).

⁶ Prima Nurahmi M, *loc. cit.*

⁷ R. Aria Wirjaatmadja dan R. Poerwasoepradja, *Babad Banjoemas*, Poerwokerto: tanpa penerbit, 1932, hlm. 69.

Krisis ekonomi yang menyengsarakan masyarakat Banyumas ini akhirnya mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meringankan beban masyarakat dengan berinisiatif mendirikan dapur-dapur umum. Dapur-dapur umum ini didirikan di kawedanan, kecamatan, dan desa. Biaya dari dapur umum ini selain berasal dari bantuan pemerintah juga berasal dari gotong royong masyarakat. Dapur umum ini ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan atau mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selain mendirikan dapur-dapur umum pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendirikan “rumah miskin”.⁸ Pemerintah mendirikan “rumah miskin” ini di beberapa tempat yang dianggap paling membutuhkan. Seperti di Kota Banyumas, “rumah miskin” didirikan di Jayegan, atau di sebelah timur kantor Karesidenan dan satu lagi di dekat pasar Banyumas. Orang-orang yang dipelihara di “rumah miskin” ini diberi makan dan pakaian. Selain itu, mereka juga dididik dalam pemeliharaan kesehatan, pendidikan ketrampilan alat-alat rumah tangga.

Bagi pemerintah kolonial Belanda sendiri, krisis ekonomi ini selain mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan pemerintah juga mengakibatkan menipisnya cadangan keuangan pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda berusaha melakukan beberapa strategi untuk menanggulangi

⁸ Soegeng Wijono dan Sunardi, *op. cit.*, hlm. 8.

krisis keuangan tersebut. Diantara strategi tersebut adalah merestrukturisasi sistem birokrasi yang ada serta melakukan pemotongan gaji pegawai-pegawai negeri. Sebagai contoh gaji seorang bupati yang biasanya sebesar f. 1350 per bulan menurun menjadi f. 1150 per bulan.⁹ Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah untuk menggaji para pegawai-pegawainya pemerintah kolonial Belanda juga berinisiatif melakukan penghapusan dan penggabungan beberapa wilayah di Karesidenan Banyumas. Salah satu wilayah yang kemudian terkena dampak dari kebijakan ini adalah Kabupaten Banyumas, dimana kemudian Kabupaten Banyumas digabung dengan Kabupaten Purwokerto dan status Kabupaten Purwokerto dihapuskan.

3. Modernisasi Transportasi dan Redupnya Kejayaan Sungai Serayu

Sebagai sebuah wilayah yang memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai ibukota karesidenan dan ibukota kabupaten, Kota Banyumas sebenarnya mempunyai satu kekurangan yang sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya kota tersebut. Faktor tersebut adalah tentang kondisi geografis wilayahnya yang cukup terisolir dan jaringan transportasi yang sulit berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa residen Banyumas dalam Memori Serah Jabatannya seperti J.J Helsdingen tahun 1928 dan M.J. van der Pauwert tahun 1925.

⁹ Prima Nurahmi M, *op. cit.*, hlm. 27.

M.J. van der Pauwert mengungkapkan dalam Memori Serah Jabatannya sebagai berikut:

Sungai Serayu yang membelah wilayah Karesidenan Banyumas menjadi dua juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan daerah itu terpencil. Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto, dan Kabupaten Purbalingga yang terletak di sepanjang sungai itu hanya mempunyai satu jembatan yang terletak di dekat kota Bayumas. Penyeberangan sungai di tempat lain harus menggunakan tambang.¹⁰

Selain itu J.J. Helsdingen pun dalam Memori Serah Jabatannya mengungkapkan tentang kondisi geografis daerah Banyumas yang cukup terisolir:

Masalah jalan adalah masalah hidup matinya Karesidenan Banyumas. Keterbelakangan daerah ini disebabkan oleh letaknya yang terpencil dan terpencilnya ini karena tidak ada jalan antar daerah. Karena itu residen memberi tugas kepada Direktur Pekerjaan Umum Daerah merencanakan pembangunan jalan dan bangunan-bangunannya. Rencana pembangunan ini diurutkan menurut urgensinya.¹¹

Dari beberapa laporan yang dituliskan oleh residen-residen Banyumas tersebut dapat diketahui bahwa memang dengan kondisi geografis yang dilalui Sungai Serayu dan dikelilingi oleh bukit-bukit membuat Karesidenan Banyumas umumnya dan Kota Banyumas khususnya menjadi daerah yang cukup terisolir, dan lambat berkembang. Akan tetapi, walaupun disatu sisi

¹⁰ M. J. van der Pauwert, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925 " *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977, hlm. XCIX.

¹¹ J. J. Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928 " *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977, hlm. CV.

Sungai Serayu memberikan dampak wilayah Banyumas terisolir, tetapi disisi lain, Sungai Serayu juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di wilayah Karesidenan Banyumas.

Sungai Serayu menjadi salah satu “nafas” penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Karesidenan Banyumas. Baik bagi masyarakat pribumi maupun masyarakat Eropa. Sebelum era transportasi darat berkembang dengan pesat, pada awal abad 20, Sungai Serayu menjadi jalur lalu-lintas utama dalam perkembangan perekonomian di wilayah Karesidenan Banyumas. Tanaman-tanaman hasil perkebunan di wilayah Karesidenan Banyumas yang akan diekspor ke luar negeri pada umumnya akan diangkut dari gudang-gudang yang ada di dekat perkebunan menggunakan kapal-kapal kecil, melalui Sungai Serayu yang kemudian akan diangkut menuju ke pelabuhan Cilacap.

Lalu lintas perekonomian benar-benar menghidupkan Sungai Serayu dan tak terkecuali Kota Banyumas, sebab Kota Banyumas merupakan pusat pemerintahan dan satu-satunya kota yang memiliki jembatan permanen diatas Sungai Serayu. Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan kondisi ini dengan membangun berbagai kantor pemerintahan dan sarana umum lain dengan harapan Kota Banyumas akan berkembang pesat dengan semakin berkembangnya lalu lintas perekonomian di atas Sungai Serayu.

Pada akhir abad ke 19 ternyata dunia transportasi di Hindia Belanda, khususnya transportasi darat mengalami perkembangan dan modernisasi yang

begitu pesat. Perkembangan transportasi di wilayah Karesidenan Banyumas pun tak lepas dari dampak modernisasi tersebut. Diawali pada tahun 1895 pemerintah kolonial Belanda menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan perusahaan trem swasta untuk memberikan ijin pengoperasian *Serajoedal Stoomtran Maatshappij* (SDS) mengeksploitasi wilayah lembah Sungai Serayu.¹² Dengan nota kesepakatan kerja sama tersebut, maka kemudian dibangunlah jalur-jalur trem untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan di sekitar lembah Sungai Serayu.

Pembangunan jalur trem pertama kali dilaksanakan 5 Desember 1896 dengan jalur trem yang dibangun menghubungkan Purwokerto-Sokaraja, kemudian berturut-turut dibangun jalur Maos-Purwokerto (16 Juli 1896), Sokaraja-Purworejo (5 Juni 1897), Purworejo-Banjarnegara (18 Mei 1898), dan Banjarsari-Purbalingga (1 Juli 1900).¹³ Pembangunan jalur trem ini bertujuan untuk mempercepat akses transportasi darat terutama untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti tebu, kopi dan tembakau.

Pembangunan jalur-jalur trem tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi di Karesidenan Banyumas. Pengangkutan barang-barang hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Melihat hal tersebut, pemerintah kemudian menginginkan pembangunan jalur trem dilakukan di wilayah Kota Banyumas. Pemerintah kolonial kemudian

¹² Prima Nurahmi M, *op. cit.*, hlm. 24.

¹³ *Ibid.* hlm. 25.

mengajukan permohonan kepada *Serajoedal Stoomtran Maatshappij* (SDS) untuk membangun jalur trem yang melewati Kota Banyumas. Dengan alasan kondisi medan yang sulit, karena Kota Banyumas dikelilingi bukit-bukit dan dilewati Sungai Serayu, pihak SDS menolak untuk melakukan pembangunan jalur trem tersebut. Sebab, jika pembangunan itu tetap dilakukan, maka hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi. Tanpa adanya jalur trem di Kota Banyumas, kondisi Kota Banyumas khususnya lalu lintas di Sungai Serayu mulai sepi.

Keadaan Kota Banyumas yang mulai sepi, kemudian diperparah dengan dibangunnya jalur kereta api Batavia-Vorstenlanden dan melalui Purwokerto yang dilakukan oleh perusahaan *staatsporwegen* (SS). Dengan dibangunnya jalur kereta api tersebut, maka dibangun pula stasiun di Purwokerto. Dengan kondisi tersebut maka pengusaha-pengusaha pemilik kantor-kantor dagang yang dahulu sangat bergantung terhadap transportasi di Sungai Serayu mulai memindahkan kantor-kantor mereka ke daerah Purwokerto yang telah memiliki akses transportasi lebih memadai. Lambat laun kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kejayaan Kota Banyumas. Kota Banyumas yang awalnya ramai dengan statusnya sebagai ibukota pemerintahan, lambat laun menjadi sepi. Kota Banyumas tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan modernisasi transportasi, yang saat itu menjadi hal paling utama dalam perkembangan perekonomian daerah perkotaan.

B. Proses Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto

1. Proses perpindahan pusat pemerintahan

Proses perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto merupakan sebuah proses yang panjang. Walaupun sebenarnya Kota Banyumas telah dirancang dan dibangun untuk menjadi sebuah kota pusat pemerintahan. Modernisasi transportasi dan terjadinya krisis ekonomi global menjadi dua faktor utama yang kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda memutuskan perpindahan pusat pemerintahan tersebut. Namun, pemerintah kolonial Belanda dalam mengeluarkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan tersebut tidaklah mudah. Berbagai pertimbangan dan investigasi dilakukan untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut.

Usulan pemindahan pusat pemerintahan yang pertama yang dikemukakan oleh tuan Mullemeister pada tahun 1896 tidak mendapat respon yang berarti dari pemerintah kolonial Belanda. Karena alasan pemindahan yang disampaikan oleh tuan Mullemeister tidak cukup kuat. Usulan tersebut dianggap akan merugikan Kabupaten Banyumas karena pusat pemerintahan yang masyur tersebut akan menjadi terasingkan dan terisolasi.¹⁴

Hampir seperempat abad kemudian tepatnya pada akhir tahun 1928-an wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut kembali muncul. Wacana

¹⁴ W. Ch. Adrians, *loc. cit.*

tersebut muncul sebagai akibat dibukanya jalur rel kereta api Cirebon-Kroya yang melewati Purwokerto pada Januari 1928. Dengan dibukanya jalur kereta api tersebut, Kota Purwokerto menjadi semakin ramai, sebaliknya Kota Banyumas berangsur-angsur mulai sepi. Residen Banyumas W. Ch. Adrians pada 4 Februari 1933 menulis sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Dalam surat tersebut dituliskan tentang dinamika yang terjadi di Banyumas ketika ada wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Kemudian dalam surat tersebut juga dituliskan tentang pandangan dari W. Ch. Adrians terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Hampir seperempat abad setelah usul yang disampaikan oleh tuan Mullemeister pada 1896 tentang perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto mengalami kekosongan kepemimpinan. Hal ini membuat Residen Banyumas W. Ch. Adrians berpandangan bahwa sebaiknya Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto digabung dan memindahkan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto. Situasi tersebut ternyata juga diketahui *Directeur van Binnenlandsch Bestuur* (Direktur Urusan Dalam Negeri) pemerintah kolonial Belanda. Direktur Urusan Dalam Negeri pemerintah kolonial Belanda juga sependapat dengan Residen Banyumas W. Ch. Adrians, bahwa kemungkinan perpindahan pusat

pemerintahan tersebut akan terlaksana. Akan tetapi Direktur Urusan Dalam Negeri pemerintah kolonial Belanda berpendapat bahwa rencana pemindahan tersebut perlu perencanaan yang lebih matang, mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya.¹⁵

Melalui tulisannya pada tanggal 24 Februari 1921 No. 109, Direktur Urusan Dalam Negeri pemerintah kolonial Belanda tuan Schippers berpendapat bahwa pembukaan jalur kereta api Kroya-Cirebon yang melewati Purwokerto memberikan dampak yang baik bagi Purwokerto. Aktivitas di Kota Purwokerto menjadi ramai karena pemerintah kolonial Belanda kemudian membangun stasiun kereta api.¹⁶ Dengan kondisi tersebut, tuan Schippers melalui tulisannya berpendapat bahwa sebagai konsekuensi dari ramainya jalur kereta api Cirebon-Kroya yang melewati Purwokerto, maka harus dibentuk satu daerah *afdeeling* baru. Dalam hal tersebut tuan Schippers berpendapat, kiranya Kabupaten Cilacap atau Banyumas harus digeser.¹⁷ Kemudian tuan Schippers meminta agar Residen Banyumas saat itu M. J. van der Pauwert segera merancang kemungkinan-kemungkinan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

M. J. van der Pauwert sebagai residen Banyumas saat itu, tidak menerima usulan dari Direktur Urusan Dalam Negeri, yang menginginkan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Purwoketo. Direktur Urusan Dalam Negeri pemerintah kolonial Belanda kemudian membuat surat kepada Residen Banyumas M. J. van der Pauwert pada tanggal 18 Juni 1921 nomor 302/rahasia.¹⁸ Surat tersebut berisi pendapat dari Direktur Urusan Dalam Negeri tentang wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

Berbeda dengan isi surat yang ditulis sebelumnya, pada surat yang kedua ini Direktur Urusan Dalam Negeri lebih menekankan bahwa penghematan pengeluaran pemerintahan harus dilakukan. Sehingga wacana untuk melakukan penghapusan salah satu kabupaten antara Banyumas atau Purwokerto mungkin akan dilakukan. Pemindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Kota Purwokerto kiranya memerlukan biaya yang mahal dan perlu kajian yang lebih mendalam lagi.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah kolonial Belanda dalam mengkaji pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto, maka pada 23 November 1925 diadakan pertemuan antara Residen Banyumas dengan pegawai-pegawai pemerintahan Karesidenan Banyumas baik pegawai Eropa maupun pribumi. Namun dalam pertemuan tersebut belum disepakati pemindahan pusat pemerintahan tersebut. Dalam

¹⁸ *Ibid.*

pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan tentang pembentukan wilayah Banyumas Selatan yang tersusun dari Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Cilacap serta wilayah Banyumas Utara yang tersusun dari Banyumas, Purbalingga.¹⁹

Pada tanggal 16 Maret 1925 Residen Banyumas mengirimkan surat kepada Direktur Urusan Dalam Negeri. Surat dengan nomor 126/rahasia tersebut berisi tentang penentangan terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Dalam surat tersebut juga berisi tentang permohonan untuk mempertimbangkan lebih matang lagi rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Perbincangan mengenai perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto semakin meluas.²⁰ Dalam Memori Serah Jabatan yang ditulis oleh Residen Banyumas W. Ch. Adrians, residen menuliskan bahwa seorang penentang sejati terhadap wacana perpindahan pusat pemerintahan adalah tuan van Helsdingen Residen Banyumas yang menjabat dari tahun 1925-1928. Tuan Helsdingen berpandangan bahwa perpindahan tersebut merupakan sebuah hal yang irasional. Kedudukan Kabupaten Banyumas sebagai sebuah pusat pemerintahan yang telah mempunyai sejarah yang panjang seharusnya bisa tetap dipertahankan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Residen W. Ch. Adrians merupakan seseorang yang sangat mendukung terhadap wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Purwoketo. Bahkan demi mempertahankan pendapatnya terhadap pemindahan pusat pemerintahan tersebut, W. Ch. Adrians sampai membuat sebuah pledoi (surat pembelaan) terhadap wacana perpindahan pusat pemerintahan tersebut.²¹ W. Ch. Adrians berpendapat bahwa kondisi yang saat itu terjadi di wilayah Karesidenan Banyumas, sangat mendukung untuk dilakukan pemindahan pusat pemerintahan. Kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis berat, redupnya aktifitas perekonomian Sungai Serayu, dan modernisasi transportasi darat menjadikan Kota Banyumas mengalami keterpurukan. Sebaliknya, aktifitas di Purwokerto semakin ramai setelah dibukanya stasiun kereta api. Hal tersebut menjadi alasan utama W. Ch. Adrians untuk segera melakukan pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Kondisi Kota Purwokerto yang semakin ramai dan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten sekaligus Karesidenan Banyumas tersebut juga diceritakan oleh R. Poerwasoepradja dalam Babad Banjoemas berikut ini:

Kita kabupaten ingkang ing enggal mangke katingal madjeng. Inggih ing Poerwakerta, sarehning kalebet tengah-tengah ing nagari (Residensi), toer wonten lampah sepoer anglangkoengi kita, ing ngrikoe dipoen jasani pamoelangan-pamoelangan warni-warni, kedjawi sekolahan-sekolahan dosoen, sekolahan angka II, perpoleg lan H.I.S. oegi milo, kwiksekoel (soewak), H.C.S., normalsekoel, H.J.S.

²¹ *Ibid.*

Ardjoena, lan sanesipoen golongan bangsa Islam, bangsa Tiong Hoa, oegi ladjeng dipoen wonteni kloestersekoel. Lare-lare ingkang bade ngoedi kasagedan datang sekolahan-sekolahan inggil saged angsal dedasar sae wonten salebeting kita Poerwakerta.²²

(Kabupaten kita yang baru nanti terlihat maju. Yaitu di Poerwakerta, yang letaknya termasuk ditengah-tengah wilayah karesidenan, dan ada jalan kereta api yang melewati kabupaten kita, di sana diberikan jasa pendidikan macam-macam, selain sekolah-sekolah desa, sekolah angka II, perpoleg dan H.I.S, juga ada kwiksekoel, H.C.S. normalskoel, H.J.S. Ardjoena, dan lainnya golongan bangsa Islam, bangsa Tiong Hoa, juga kemudian diadakan kloestersekoel. Anak-anak yang akan menuntut ilmu datang ke sekolah-sekolah tinggi bisa mendapat dasar yang bagus di kabupaten kita Poerwakerta).

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam *staatsblad* tahun 1935 nomor. 631 dan nomor 632 tentang penghapusan Kabupaten Purwokerto yang diikuti penggabungan wilayah kabupaten tersebut dengan wilayah Kabupaten Banyumas menjadi pintu awal dari kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

Perdebatan serta pro dan kontra yang terjadi selama bertahun-tahun terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan tersebut akhirnya reda. Residen Banyumas dan Dewan Kabupaten akhirnya sepakat dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan tersebut. Pada bulan Januari 1937 pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas resmi dipindah ke Purwokerto.

²² R. Aria Wirjaatmadja dan R. Poerwosoepadja, *loc.,cit.*

2. Upacara Perpindahan Bupati Banyumas ke Purwokerto

Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto merupakan sebuah peristiwa yang besar. Oleh karena itu pemerintah di Banyumas mulai dari Residen sampai Bupati dan pegawai-pegawai lainnya telah menyiapkan upacara yang meriah untuk merayakan pindahnya bupati Banyumas ke Purwokerto. Peristiwa upacara perpindahan tersebut pun dikabarkan oleh beberapa surat kabar di Jawa Tengah. Seperti salah satu surat kabar yaitu surat kabar Djawa Tengah yang mengabarkan berita berikut ini:

Regent Poerwokerto, OEPATJARA PEMAKEAN KABOEPATEN JANG BAROE DIBIKIN BETOEL.

Dari Purwokerto ada dikabarkan bahoea pada hari Rebo tanggal 6 Januari baroe ini Regent dari regentschappen Banjoemas dan Poerwokerto, Raden Ario Adipatie Soedjiman Martadiredja Gandasoebrata dengan dianter oleh banjak orang telah dateng dalem kaboepaten jang baroe dibikin betoel di Poerwokerto.

Kira-kira pada djam 8 pagi beliau dengan istrinja dan bebrapa orang lagi telah masoek dalem kota Poerwokerto. Di moeka kota Poerwokerto beliau telah disamboet oleh satoe comite jang telah dibangoenken belon lama berselang da nada terdiri dari bebrapa bestuursambtenaren Indonesier jang soeda pensioen. Itoe comite ada dipimpin oleh R. Hardjowarsono, gepensionneerd ambtenaar pada landrente dan satoe groep orang Tionghoa lagi jang telah persembahkan pada beliau satoe bouquet dengan pita kleur Oranje-Idjo, boeat ini oepatjara penjamboetan oleh comite terseboet telah didirikan satoe pintoe gerbang, diatas mana ada ditoelis pembrian slamet datang pada beliau dan familienja.

Dalem kaboepaten beliau telah disamboet oleh asisten-resident dari Poerwokerto dan njonja Prins, aspirant controleur toean J. C. Tiggelman dan bebrapa ambtenaren Indonesier lagi dengan marika poenja istri. Pendopo dari ini kaboepaten

dibikin betoel dan bangoennja telah dibikin sama dengan pendoponja regent di Banjoemas.

Di joebin ada terletak satoe goedri jang menoeroet keterangannja regent terseboet ada barang pesenan dari Gouverneur-Generaal Sloet van der Beele, djadi sampe sekarang itoe barang soeda 100 taon mendjadi kepoenjaannja beliau poenja familie.

Dalem itoe Kaboepaten toean R.Sarwadi, wedono dari Banjoemas telah boeka bitjara dan menjataken menjesalnja jang regent terseboet telah pindah ke Poerwokerto, sebab Banjoemas ada temapt tinggalnja familienja Regent Gandasoebrata sedari brapa poloe taon lamanja. Djuga ia minta kepada colleganja jang ada tinggal di Poerwokerto, soepaja marika bersama-sama soeka menjenengken regent terseboet dengan istrinja tinggal di tempatnja jang baroe ini. Sadoedanja toean Sarwadi boeka bitjara, laloe toean R. Sosrodiprodjo, patih dari Poerwokerto boeka bitjara jang berakhir dengan doa do'a dari penghoeloe Poerwokerto. Sampe disini itoe oepatjara abis. Pengabisan ada dipertoenjoeken wajang orang dalem Kaboepaten.²³

(Kabupaten Purwokerto, UPACARA PEMAKAIAN KABUPATEN YANG BARU.

Dari Purwokerto dikabarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari ini bupati dari Kabupaten Banyumas dan Purwokerto, Raden Ario Adipati Soedjiman Martadiredja Gandasoebrata dengan diantar oleh banyak orang telah datang di kabupaten yang baru di Purwokerto.

Kira-kira pada jam 8 pagi beliau dengan istrinya dan beberapa orang lagi telah masuk Kota Purwokerto. Di muka Kota Purwokerto beliau telah disambut oleh satu komite yang telah dibentuk dan terdiri dari beberapa pegawai pemerintahan Indonesia yang sudah pensiun. Komite tersebut dipimpin oleh tuan R. Hardjowarsono, pensiunan pejabat pajak tanah dan satu kelompok lagi orang Tionghoa yang memberikan pada beliau satu bouquet dengan pita warna orange-hijau, untuk upacara penyambutan ini komite telah mendirikan satu pintu gerbang, yang diatasnya dituliskan ucapan selamat datang bagi bupati dan keluarganya.

²³ Surat Kabar Djawa Tengah, *Regent Poerwokerto, oepatjara Pemakean Kaboepaten Jang Baroe Dibikin Betoel*, Semarang: Senin 11 Januari 1937. lembar kedua, kolom 5.

Di dalam kabupaten beliau telah disambut oleh asissten residen dari Purwokerto, nyonya Prins, asisten controlir tuan J.C. Tiggelman dan beberapa pejabat Indonesia dengan istri-istrinya. Pendopo dari kabupaten yang baru ini telah dibangun sama dengan pendopo yang ada di Kabupaten Banyumas.

Di jubin (lantai) terletak sebuah goedri yang menurut keterangan bupati, itu merupakan barang yang dipesan oleh Gubernur Jenderal Sloet van der Beele, jadi sampai saat ini barang tersebut telah 100 tahun menjadi milik keluarga beliau.

Dalam kanupaten itu tuan R. Sarwadi, wedono dari Banyumas telah berbicara dan menyatakan penyesalannya karena Bupati telah pindah ke Purwokerto, sebab Banyumas merupakan tempat tinggal dari Bupati Gandasoebrata dan keluarganya yang sudah puluhan tahun lamanya. Tuan R. Sarwadi juga meminta kepada koleganya yang tinggal di Purwokerto agar mereka bersama-sama menyenangkan (membuat nyaman) bupati dan istrinya yang tinggal di tempatnya yang baru tersebut.

Sesudah tuan Sarwadi berbicara, lalu tuan R. Sosrodiprodjo patih Purwokerto berbicara, dan kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh penghulu Purwokerto. Sampai disini upacara tersebut selesai.

Terakhir ada ditampilkan pertunjukan wayang orang di kabupaten).

Dari berita yang dituliskan dalam surat kabar diatas dapat diketahui satu fakta yang menarik. Fakta yang menurut penulis belum diketahui selama ini. Dari berita diatas penulis menyimpulkan bahwa pada tanggal 6 januari tersebut Bupati Banyumas bersama keluarga sudah pindah tempat tinggal ke Purwokerto. Sejauh ini, beberapa orang masih berpendapat bahwa pada Januari 1937 peristiwa yang terjadi hanyalah pindahnya kantor Bupatinya saja atau pendopo si Panji. Sedangkan Bupati Banyumas bersama keluarga pindah ke Purwokerto baru bulan Maret 1937. Seperti dalam penelitian sebelumnya yang

ditulis oleh Prima Nurrahmi Mulyasari mahasiswa UGM tahun 2006. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pada Januari 1937 merupakan peristiwa pindahnya pendopo Si Panji dari Banyumas ke Purwokerto saja, sedangkan pindahnya Bupati Banyumas bersama keluarga ke Purwokerto terjadi pada bulan Maret 1937.

Pemberitaan tentang pindahnya Bupati Banyumas ke Purwokerto juga diberitakan pula dalam surat kabar Matahari edisi Sabtu 9 Januari 1937. Dalam sebuah kolom berita singkat dituliskan sebagai berikut:

Tetep Pinda di Poerwokerto

Moelai dari peraja'an Poetri Julliana Boepati Banjoemas soeda menempatin Kaboepaten Poerwokerto oentoek sateroesnja, sedeng Residen menoengoe klaarnja gedong jang sekarang ini pekarangannja lagi moelai dikerdjaken, jaitoe di Schoolweg kampoeng Setapen.²⁴

Tetap Pindah di Purwokerto

(Mulai dari perayaan Putri Julliana Bupati Banyumas sudah menempati Kabupaten Purwokerto untuk seterusnya, sedangkan Residen menunggu selesainya gedung yang sekarang sedang mulai dikerjakan, yaitu di Schoolweg kampoeng Setapen).

Pemerintah Banyumas telah mempersiapkan acara perpindahan Bupati dari tempat tinggalnya di Banyumas ke Purwokerto dengan matang. Polisi-polisi keamanan disiapkan oleh pemerintah untuk mengawal perjalanan Bupati beserta rombongannya dari Banyumas ke

²⁴ Surat Kabar Matahari, *Tetep Pinda di Poerwokerto*, Semarang: Sabtu 9 Januari 1937. Lembar kedua taun 4 no. 6, kolom 5.

Purwokerto. Polisi-polisi tersebut memakai seragam dan bersenjatakan senapan berdiri dengan gagah mengamankan jalannya acara tersebut. Polisi-polisi tersebut ada yang bersepeda, ada yang berjalan kaki serta ada pula yang menggunakan sepeda motor mengamankan jalannya acara perpindahan Bupati Banyumas ke Purwokerto tersebut.

Pemberangkatan Bupati Banyumas beserta rombongan pejabat-pejabat lainnya dilakukan di depan kantor Karesidenan Banyumas. Dengan dikawal oleh polisi-polisi keamanan, bupati beserta rombongan tiba di Purwokerto kira-kira pada jam 8 pagi. Setibanya di kantor kabupaten yang baru di Purwokerto, bupati disambut dengan hangat oleh beberapa pejabat yang ada di Purwokerto.

Untuk merayakan pindahanya Bupati Banyumas ke Purwokerto, pada hari kamis 7 Januari diadakan acara arak-arakan sepanjang jalan di Kota Purwokerto. Ribuan masyarakat turut serta dalam acara tersebut. Anak-anak sekolah berkumpul dan berbaris disekitar alun-alun purwokerto ikut dalam perayaan perpindahan Bupati Banyumas ke Kota Purwokerto tersebut.

3. Perpindahan Kantor Karesidenan ke Kota Purwokerto

Pemindahan kantor karesidenan dari Banyumas ke Purwokerto menjadi sebuah persoalan yang cukup rumit. Sejak digabungnya wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto pada 1 Januari 1936 hingga pindahanya Bupati Banyumas ke Kota Purwokerto

pada Januari 1937, Residen masih berkantor dan bertempat tinggal di Banyumas. Padahal berdasarkan rencana seharusnya Residen sudah bisa berpindah kantor yang baru di Purwokerto pada tahun 1937 bersamaan dengan pindahnya Bupati Banyumas ke Purwokerto.²⁵ Mundurnya kepindahan Residen Banyumas ke Purwokerto dikarenakan belum selesainya pembangunan kantor karesidenan yang baru di Purwokerto.

Keterlambatan penyelesaian pembangunan kantor residen yang baru di Purwokerto disampaikan oleh residen Banyumas yang saat itu menjabat, van Huls kepada Gubernur Jawa Tengah. Melalui surat dengan nomor 3846/15 tanggal 31 Maret 1937 residen menyampaikan laporan dan pandangannya terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan kantor residen di Purwokerto.²⁶ Dalam surat tersebut van Huls menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Maret 1937 Ir. W. Lemei Jr. selaku penanggung pembangunan kantor residen bahwa pembangunan kantor residen yang di Purwokerto tidak akan bisa diselesaikan tepat waktu.

²⁵ H.G.F. Van Huls, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

²⁶ *Ibid.*

Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembangunan gedung residen yang baru adalah karena sesuai dengan rencana bahwa lantai-lantai yang akan digunakan untuk kantor residen yang baru merupakan lantai-lantai marmer yang ada di kantor karesidenan di Banyumas. Pembongkaran dan pemindahan lantai-lantai marmer tersebut menjadi sebuah kendala. Sebelum pembongkaran lantai-lantai marmer tersebut dilakukan, maka seharusnya residen telah mempunyai kantor dan tempat tinggal sementara yang layak. Berdasarkan pertimbangan, Residen Banyumas berpendapat bahwa pada liburan bulan Juli, kantor dan tempat tinggal sementara Residen Banyumas bisa dipindahkan ke gedung sekolah MULO di Purwokerto. Kemudian pada bulan September kiranya pemerintah bisa menyewa tempat tinggal dan kantor administrasi pabrik gula di Purwokerto untuk digunakan sebagai kantor residen sementara. Residen memperhitungkan seharusnya jangka waktu 6 bulan cukup untuk menyelesaikan pembangunan kantor residen yang baru.²⁷

Melalui surat nomor 9412/328 tanggal 4 Juni 1937, Gubernur Jawa Tengah memberikan tanggapannya terhadap surat yang dikirim

²⁷ *Ibid.*

dari Residen Banyumas van Huls.²⁸ Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa pembangunan kantor residen yang baru di Purwokerto baru bisa diselesaikan secepatnya pada bulan Mei tahun 1938. Kemudian berkaitan dengan kendala terhadap pembongkaran lantai marmer di kantor Karesidenan Banyumas, Gubernur memberikan solusi bahwa rencananya setelah lantai-lantai marmer tersebut dibongkar, segera akan diganti dengan lantai tegel, sehingga meskipun kantor karesidenan tersebut tidak seperti kondisi normal, tetapi masih layak untuk dijadikan sebuah kantor dan tempat tinggal residen.

4. Kesakralan Pendopo Kabupaten Banyumas (Pendopo Si Panji)

Pendopo Si Panji merupakan simbol pemerintahan kabupaten Banyumas. Masyarakat Banyumas secara turun-temurun mempercayai bahwa pendopo Si Panji merupakan bangunan yang sakral. Terutama pada bagian ke empat tiang utama penyangga bangunan pendopo tersebut, yang masyarakat umumnya menyebutnya dengan *saka guru*.

Pendopo Si Panji merupakan pendopo yang dibangun oleh Bupati Banyumas ke VII, Tumenggung Yudanegara II. Yudanegara II menjadi Bupati Banyumas dari masa pemerintahan Susuhunan

²⁸ *Ibid.*

Pakubuwono hingga Pakubuwono II.²⁹ Nama pendopo Si Panji merupakan nama yang diberikan langsung oleh Tumenggung Yudanegara II. Nama tersebut diambil dari nama putranya R. Panji Gandakusuma.

Pada saat rencana perpindahan pusat pemerintahan dari Kabupaten Banyumas ke Purwokerto menjadi kenyataan, banyak kekhawatiran tentang nasib dari pendopo Si Panji. Terutama bagi masyarakat Banyumas yang pada saat itu masih memegang teguh tradisi. Memindahkan sebuah pendopo kabupaten yang telah berusia ratusan tahun dari Banyumas ke Kota Purwokerto bukan merupakan hal yang sederhana. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sakral.

Hingga saat ini ada dua pendapat tentang bagaimana pendopo Si Panji di pindah dari Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa perpindahan pendopo Si Panji ke Kota Purwokerto dilakukan tanpa menyeberangi Sungai Serayu. Artinya harus memutar menyusuri Sungai Serayu melalui Wonosobo terus ke utara sampai Karesidenan Pekalongan hingga kemudian sampai di Purwokerto.³⁰ Masyarakat berkeyakinan, bahwa

²⁹ Sugeng Priyadi, *Sejarah Intelektual Banyumas*, Yogyakarta: Aksara Indonesia, 2007, hlm. 19.

³⁰ Prima Nurahmi M, *op. cit.*, hlm. 31.

memindahkan pendopo Si Panji ke Purwokerto dengan menyeberangi Sungai Serayu merupakan sebuah pantanangan dari leluhur-leluhur.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa perpindahan pendopo Si Panji ke Kota Purwokerto sebenarnya tetap melewati dan menyeberangi Sungai Serayu. Pernyataan pemindahan pendopo Si Panji yang dipindah ke Kota Purwokerto tanpa menyeberangi Sungai Serayu hanya Bahasa politik. Masyarakat yang berpendapat demikian beranggapan bahwa saat itu tahun 1937 di Kota Banyumas sudah tersedia jembatan permanen yang menjadi akses langsung ke kota Purwokerto. Sehingga, mustahil memindahkan sebuah pendopo dari Banyumas ke Purwokerto sampai harus berputar sangat jauh. Masyarakat berpendapat bahwa isu pemindahan pendopo Si Panji tidak menyeberangi Sungai Serayu hanyalah sebuah isu yang sengaja dimunculkan demi menjaga keamanan proses pemindahan pendopo tersebut.

Sebagaimana kepercayaan masyarakat yang menyatakan pendapat tersebut. Bahwa pada masa pemerintahan Bupati Banyumas Adipati Wargautama I tahun 1546, pernah terjadi konflik besar dengan penguasa wilayah Sokaraja yaitu Ki Demang Toyareka. Hingga akhirnya Adipati Wargautama terbunuh. Peristiwa tersebut sangat dikenang oleh masyarakat Banyumas, sehingga perasaan dendam dan permusuhan terus ada hingga turun temurun.

Hingga saat peristiwa pemindahan Pendopo Si Panji tersebut, para sesepuh Banyumas berpendapat bahwa untuk memindahkan pendopo Si Panji sampai ke Purwokerto harus menggunakan siasat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Hal tersebut karena untuk bisa sampai di Purwokerto rombongan yang membawa pendopo Si Panji harus melewati wilayah Sokaraja. Karena jalur tersebut merupakan jalur utama dan satu-satunya jalur yang bisa ditempuh dengan mudah saat itu. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah berita bahwa pemindahan pendopo Si Panji tidak melewati menyeberangi Sungai Serayu, padahal sesungguhnya tetap menyeberangi Sungai Serayu, melewati Sokaraja hingga sampai di Purwokerto.

Berdasarkan penelitian penulis dari hasil wawancara dan kajian terhadap sumber-sumber yang penulis peroleh maka menurut penulis, pemindahan pendopo Si Panji dari Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto pada tahun 1937 dilakukan tetap dengan memutar tanpa melewati Sungai Serayu. Hal tersebut didasarkan dari pertimbangan rasionalitas saat itu. Bahwa kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi leluhur masih sangat kuat. Sehingga pantangan menyeberangi Sungai Serayu dalam membawa pendopo Si Panji ke Kota Purwokerto sangat mungkin. Sebaliknya alasan konflik

turun-temurun yang terjadi antara Bupati Banyumas dengan penguasa wilayah Sokaraja Ki Demang Toyareka yang terjadi tahun 1500-an , nampaknya sudah tidak relevan, karena secara logika sebuah konflik tidak akan terus terjadi turun-temurun hingga 400 tahunan lamanya.